

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2011). Tujuan pembangunan ekonomi antara lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengentasan kemiskinan, menjaga kestabilan harga dengan selalu memperhatikan tingkat inflasi, menjaga keseimbangan pembayaran, pendistribusian pendapatan yang merata dan mengurangi angka pengangguran (Alghofari, 2010). Pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui kepada siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran.

Pengangguran adalah masalah yang hampir dihadapi oleh seluruh negara di dunia khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, secara umum pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja (Mulyadi, 2014). Meningkatnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang serius, karena dapat menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, kesenjangan pendapatan hingga kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Berdasarkan cirinya pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah pengangguran terbuka. Menurut (Mulyadi, 2014) pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat dilihat secara nyata dalam keadaan menganggur. Mereka tidak melakukan

sesuatu kerja untuk mencari nafkah apa pun pada waktu mereka tergolong sebagai pengangguran atau dalam keadaan menganggur (Sukirno, 2015).

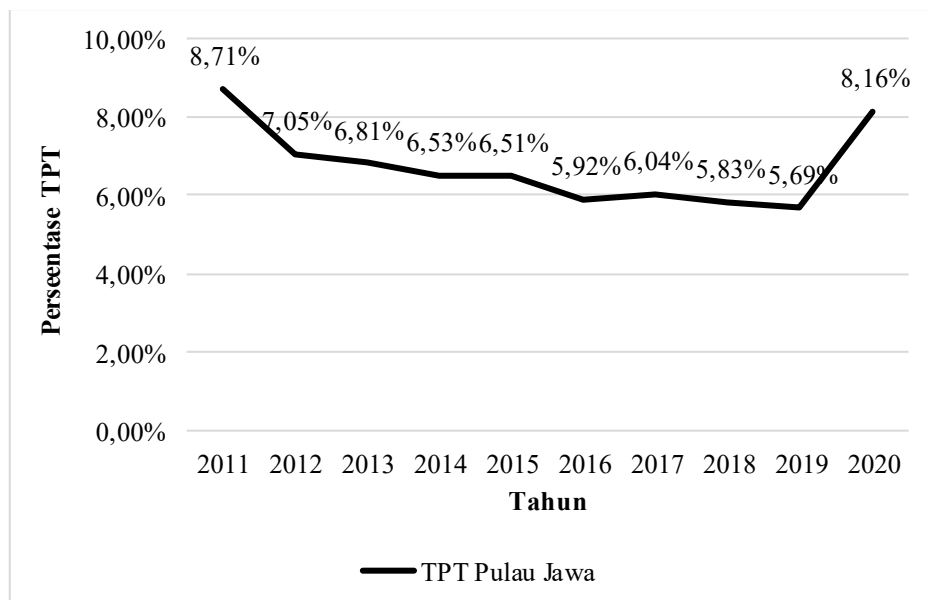
Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mengalami masalah pengangguran relatif tinggi. Tiga provinsi dalam Pulau Jawa pada tahun 2020 memiliki persentase lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran Terbuka seluruh Indonesia yang mencapai 7,07% (BPS, 2021). Hal ini bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa Tahun 2011-2020

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)										Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Banten	13,74	9,94	9,54	9,07	9,55	8,92	9,28	8,47	8,11	10,64	9,73
2	Jawa Barat	9,96	9,08	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	8,23	8,04	10,46	8,92
3	DKI Jakarta	11,69	9,67	8,63	8,47	7,23	6,12	7,14	6,55	6,54	10,95	8,30
4	Jawa Tengah	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,63	4,57	4,47	4,44	6,48	5,40
5	Jawa Timur	5,38	4,11	4,30	4,19	4,47	4,21	4,00	3,91	3,82	5,84	4,42
6	DI Yogyakarta	4,39	3,90	3,24	3,33	4,07	2,72	3,02	3,37	3,18	4,57	3,58

Sumber: BPS Indonesia

Untuk memperjelas perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2011-2020 dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1
Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Pulau Jawa Tahun 2011 s.d. 2020

Gambar 1 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa mengalami permasalahan berfluktuasi TPT, tahun 2011 TPT sebesar 8,71 persen, tahun 2012 TPT turun menjadi 7,05 persen, tahun 2013 TPT turun lagi menjadi sebesar 6,81 persen, tahun 2014 TPT turun lagi menjadi 6,53, tahun 2015 TPT turun menjadi 6,51 persen, tahun 2016 TPT turun menjadi 5,92 persen, tahun 2017 TPT meningkat menjadi 6,04 persen, tahun 2018 TPT turun lagi menjadi 5,83 tahun 2019 TPT mengalami kenaikan menjadi 5,69 persen dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 8,16 persen. Hal ini terjadi karena adanya pandemik *covid-19* yang melanda di Indonesia yang menyebabkan banyaknya pekerja-pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat lumpuhnya perekonomian dunia.

Dipilihnya Pulau Jawa dalam penelitian ini karena pada tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten menempati posisi tingkat pengangguran ke 1, 3, 12, 15 dan 2 terbanyak di Indonesia, artinya peringkat tingkat pengangguran terbanyak urutan 1 sampai 3 ada di Pulau Jawa, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2
Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2020

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	DKI Jakarta	10,95
2	Banten	10,64
3	Jawa Barat	10,46
4
12	Jawa Tengah	6,48
15	Jawa Timur	5,84
...
27	DI Yogyakarta	4,57

Sumber: BPS Indonesia

Studi empiris Prastiwi dan Handayani (2019) dan Putra (2016), menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Jawa Timur. Berbeda halnya dengan Anggraeni (2018) yang menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Cahyadi (2013), faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun terakhir (Sukirno, 2015). Ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam PDRB. Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan anggapan apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat, dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa akhir akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang dimintanya yang artinya dapat mengurangi pengangguran. Hubungan antara PDRB dengan pengangguran dapat dijelaskan dengan hukum Okun yang mengatakan bahwa untuk setiap dua persen *Gross National Product* (GNP) secara relatif terhadap GNP potensial, tingkat pengangguran akan naik satu persen (Samuelson & Nordhaus, 1997).

Studi empiris Fachry (2015) menunjukkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa dan menurut Bahri (2021), penanaman modal asing berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Namun menurut Karisma, Subroto & Hariyati (2021), penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah penanaman modal asing (Fachry, 2015). Penanaman Modal Asing tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa: “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing maka dapat digunakan meningkatkan kegiatan produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka”.

Studi empiris Bahri (2021) menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Namun menurut Fachry (2015) penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penanaman modal dan investasi merupakan awal dari pembangunan ekonomi. Investasi di suatu negara dapat bersumber dari penanaman modal dalam negeri. Investasi tersebut memiliki tujuan meningkatkan perekonomian bangsa sehingga dapat meningkatkan kegiatan produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Menurut Keynes investasi swasta dan pengeluaran pemerintah adalah bagian dari komponen perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat adalah perbelanjaan masyarakat atas barang dan jasa dimana perbelanjaan agregat dapat menentukan kegiatan ekonomi yang dicapai suatu Negara. Apabila perbelanjaan agregat bertambah maka kegiatan ekonomi, produksi nasional dan kesempatan kerja akan meningkat. Peningkatan kesempatan kerja akan mengurangi tingkat pengangguran.

Studi empiris Mahroji dan Nurkhasanah (2019) dan Effendy (2019) menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Berbeda halnya menurut Helvira & Rizki (2020), upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah upah minimum. Upah minimum merupakan kebijakan yang berdasarkan pada kebutuhan hidup layak buruh atau pekerja atau lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun

2003, tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah minimum yang diterima pekerja adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja, hal tersebut memiliki hubungan antara seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan tingkat upah yang diinginkan. Disisi lain upah minimum hanya akan meningkatkan biaya tenaga kerja di sektor formal yang menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor tersebut menurun. Hal ini disebabkan karena upah yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi sehingga jumlah tenaga kerja yang diminta akan turun. Menurut (Alghofari, 2010) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini penting dilakukan karena tingkat pengangguran terbuka akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, serta adanya gap penelitian mengenai Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa?
2. Apakah penanaman modal asing berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa?
3. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa?
4. Apakah upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang diteliti terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Data penelitian yang digunakan dari tahun 2012 sampai dengan 2020 (Tahunan).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis signifikansi pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.
 - b. Menganalisis signifikansi pengaruh penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.
 - c. Menganalisis signifikansi pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.
 - d. Menganalisis signifikansi pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Provinsi di Pulau Jawa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan permasalahan mengenai tingkat pengangguran terbuka.

b. Bagi Akademis

Mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu ekonomi khususnya ekonomi makro dan sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.